



BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)

INFORMASI UMUM TENTANG POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN)

**Oleh
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara
Badan Nasional Pengelola Perbatasan**

Jakarta, 19 April 2018



Ir. H. JOKO WIDODO
Presiden Republik Indonesia



TJAHJO KUMOLO, SH.

Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia



Drs. H. M. JUSUF KALLA
Wakil Presiden Republik Indonesia

NAWA CITA **2014 - 2019**

1. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA
2. MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA
3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA
5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL
7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKAN SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA
9. MEMPERTEGUH KE-BHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA



DUA DIMENSI PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA

PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA (PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN)

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA (BORDER)

Batas Wilayah Negara : Garis Batas yang Merupakan Pemisah Kedaulatan Suatu Negara yang Didasarkan atas Hukum Internasional (pasal 1 huruf 4 UU 43 / 2008)

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN (FRONTIER)

(187 KECAMATAN PADA 41 KABUPATEN DI 13 PROVINSI)

- ❑ PERBATASAN DARAT: 68 KECAMATAN/LOKPRI
- ❑ PERBATASAN LAUT: 119 KECAMATAN/LOKPRI

Kawasan perbatasan : Bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di Darat, Kawasan Perbatasan berada di Kecamatan (pasal 1 huruf 6 UU 43 / 2008)

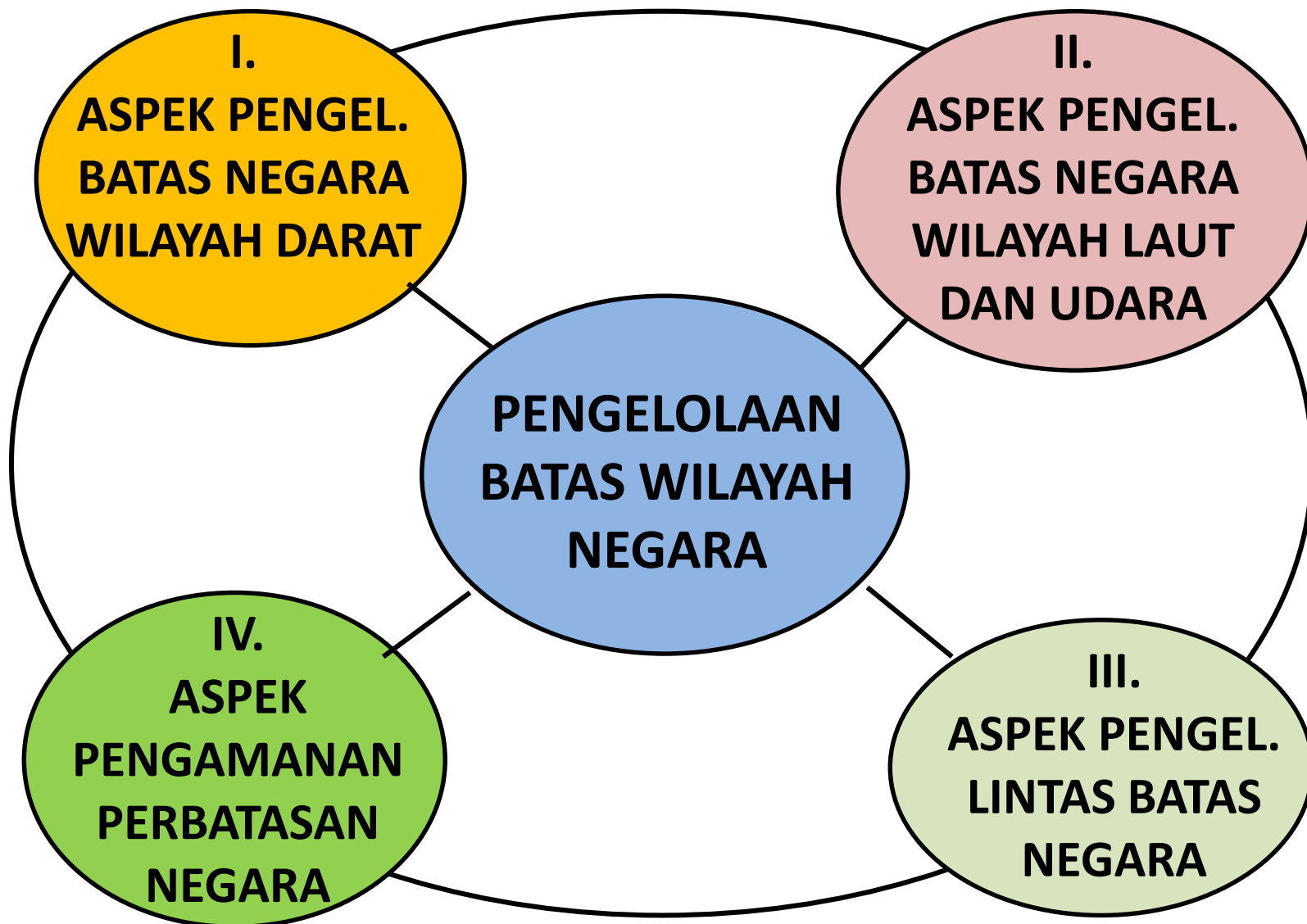
Kawasan Perbatasan Laut : Kecamatan beserta Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang menjadi Cakupannya

PENGELOLAAN PERBATASAN NEGERA PENTING DAN STRATEGIS:

- ❑ MENJAMIN KEUTUHAN WILAYAH DAN PENEGAKAN KEDAULATAN NKRI;
- ❑ PENEGAKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA (NASIONAL DAN REGIONAL);
- ❑ PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN HASIL-HASILNYA (KESEJAHTERAAN MASYARAKAT);
- ❑ MEMBANGUN DAYA SAING WARGA MASYARAKAT PERBATASAN UNTUK DAPAT MENGIMBANGI BAHKAN UNGGUL ATAS AKTIVITAS SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT NEGARA TETANGGA



EMPAT ASPEK PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA





PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA (TASBARA)



PETA *ILLEGAL ACTIVITIES* YG SERING TERJADI DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA



Diolah dari berbagai sumber, 2017.



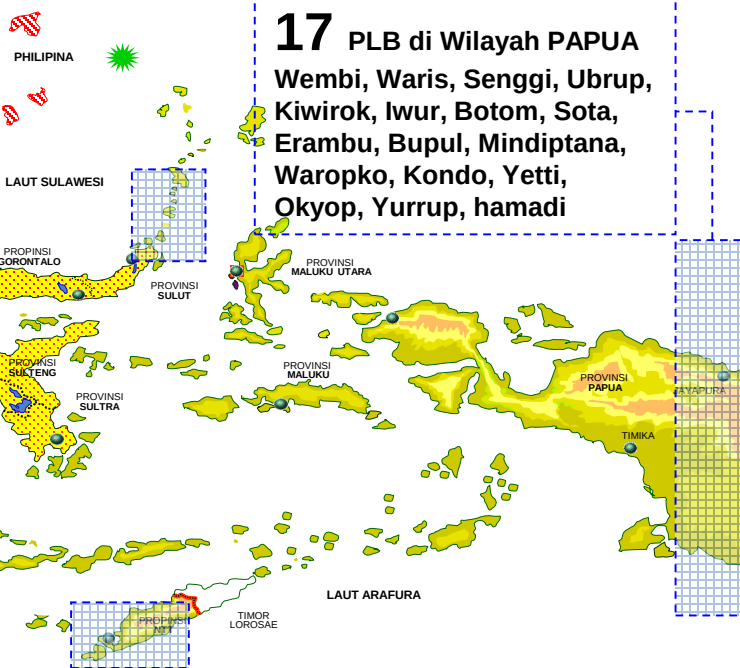
66 POS LINTAS BATAS IMIGRASI DI SELURUH INDONESIA

23 PLB Laut di Wilayah RIAU dan
KEPPRI Panipahan, Sinaboi,
Tanjung Medang, Selat Baru,
Tanjung Sema, Sungai Pakming,
Teluk Belitung, Serapung, Kuala
Gaung, Meral, Tanjung Batu, Moro,
Mapur, Senayang, Teluk Bintan,
Bintan Utara, Daek, Bulang,
Serasan, Sedanau, Sekunyam,
Midal, Tambelan, Letung

13 PLB di Wilayah
KALBAR Temanjuk, Liku,
Sajingan, Siding,
Jagoibabang, Saparan,
Segumon, Bantan, Jasa,
Nanga Bayan, Semarah,
Merakai Panjang, Langau

7 PLB di Wilayah KALTARA
Longnawang, Long Midang, Tau Lumbis,
Semanggaris, Nunukan, Sungai
Pancang, Liem Hie Djung/In Hutani
Nunukan

17 PLB di Wilayah PAPUA
Wembi, Waris, Senggi, Ubrup,
Kiwirok, Iwur, Botom, Sota,
Erambu, Bupul, Mindiptana,
Waropko, Kondo, Yetti,
Okyop, Yururup, hamadi



PLB Darat : 39
PLB Laut : 27
: 66

6 PLB di Wilayah NTT
Oepoli, Builalo, Turiskain,
Laksmaras, Haumeneana,
Laktutus



POLA PERLINTASAN ORANG/BARANG DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA

PELINTAS BATAS
NEGARA
(ORANG/BARANG)

**MELINTAS RESMI
VIA TPI/PLBN
(KAWASAN PLBN TERPADU)**

**MELINTAS RESMI
VIA PLB NON-TPI/PLBN**

MELINTAS TIDAK RESMI

**MANAJEMEN
TASBARA YANG
SESUAI DAN
MAMPU
MENJAWAB PER-
MASALAHAN YANG
KOMPLEK DAN
SPESIFIK**

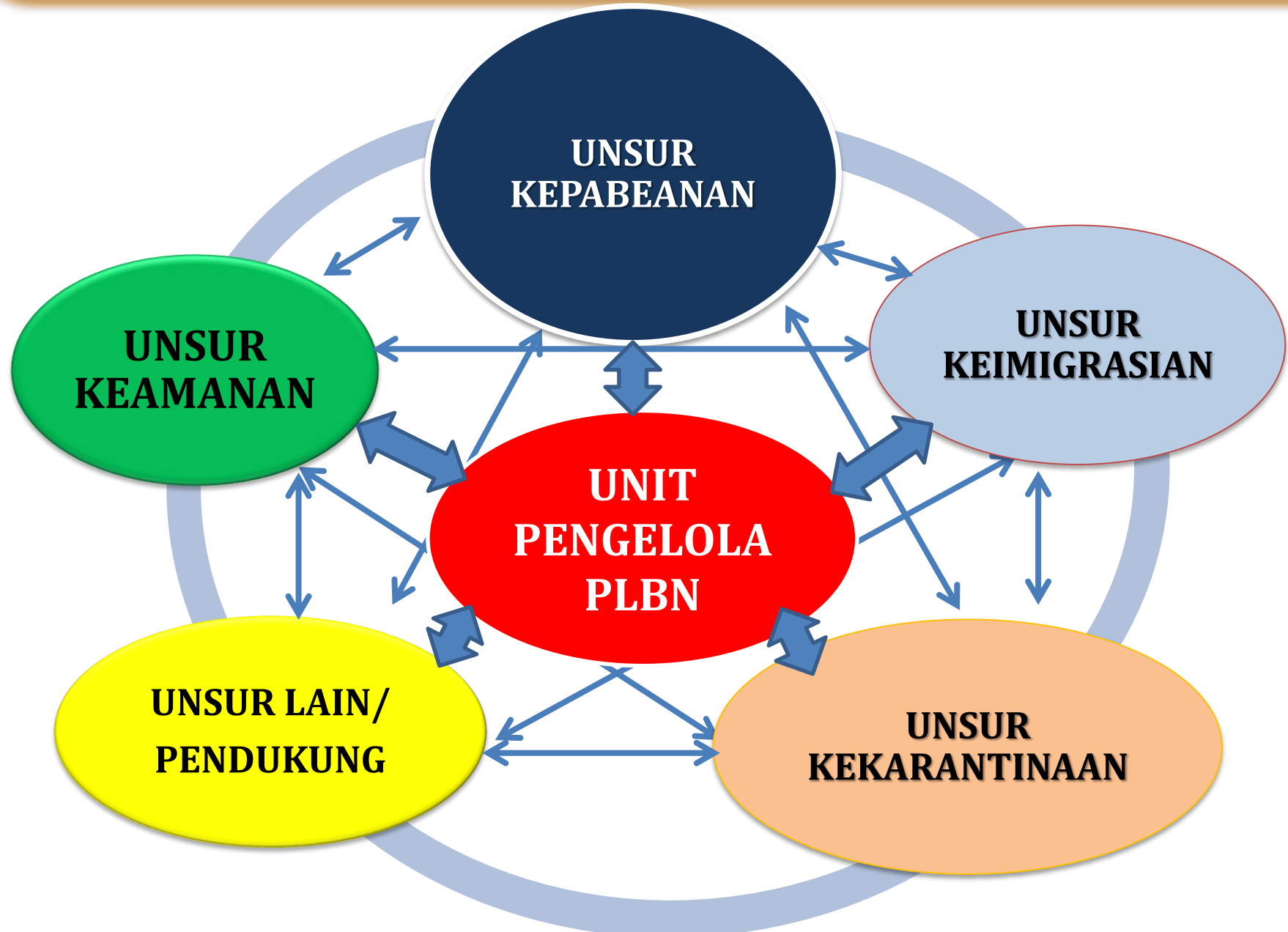


PENATAAN MANAJEMEN LINTAS BATAS NEGARA

Penerapan Sistem Pengawasan Lintas Batas Negara Berdasar Karakteristik/Tipologi Lintas Batas Negara

1. **Jalur A**, jalur lintas batas negara yang sudah modern dan dilengkapi dengan semua unsur pengawasan CIQS (*Custom, Imigration, Quarantines, dan Securities*) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
2. **Jalur B**, jalur lintas batas negara yang resmi namun bersifat tradisional dan unsur CIQS tidak lengkap dan bangunan PLBN-nya pun sederhana.
3. **Jalur C**, jalur lintas batas negara tradisional, belum ada pelayanan unsur CIQ, hanya ada Petugas Pengaman Perbatasan (PAMTAS) untuk penduduk perbatasan setempat dengan ijin terbatas khusus untuk keperluan keluarga dan bekerja di ladang/kebun.

PERLUNYA PENGEMBANGAN KETERPADUAN DALAM PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA





PERWUJUDAN KETERPADUAN DALAM PENGELOLAAN PLBN

ASPEK KEIMIGRASIAN

IMIGRASI
(Immigration)

ASPEK KEBEACUKAIAN

BEA CUKAI
(Customs)

ASPEK KARANTINA

KARANTINA
(Quarantine)

Karantina Kesehatan

Karantina Pertanian

Karantina Ikan

BNPP

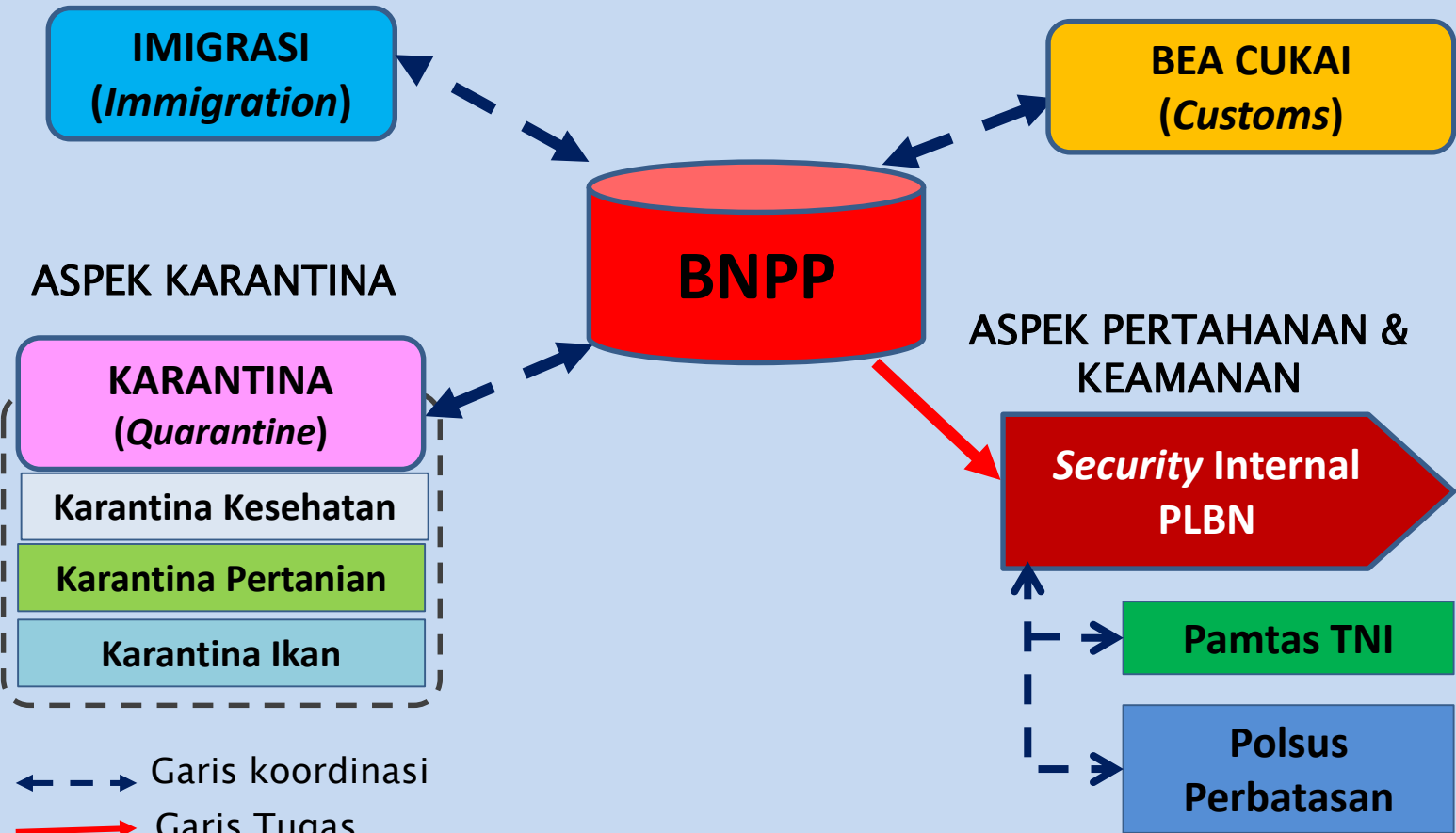
ASPEK PERTAHANAN & KEAMANAN

**Security Internal
PLBN**

Pamtas TNI

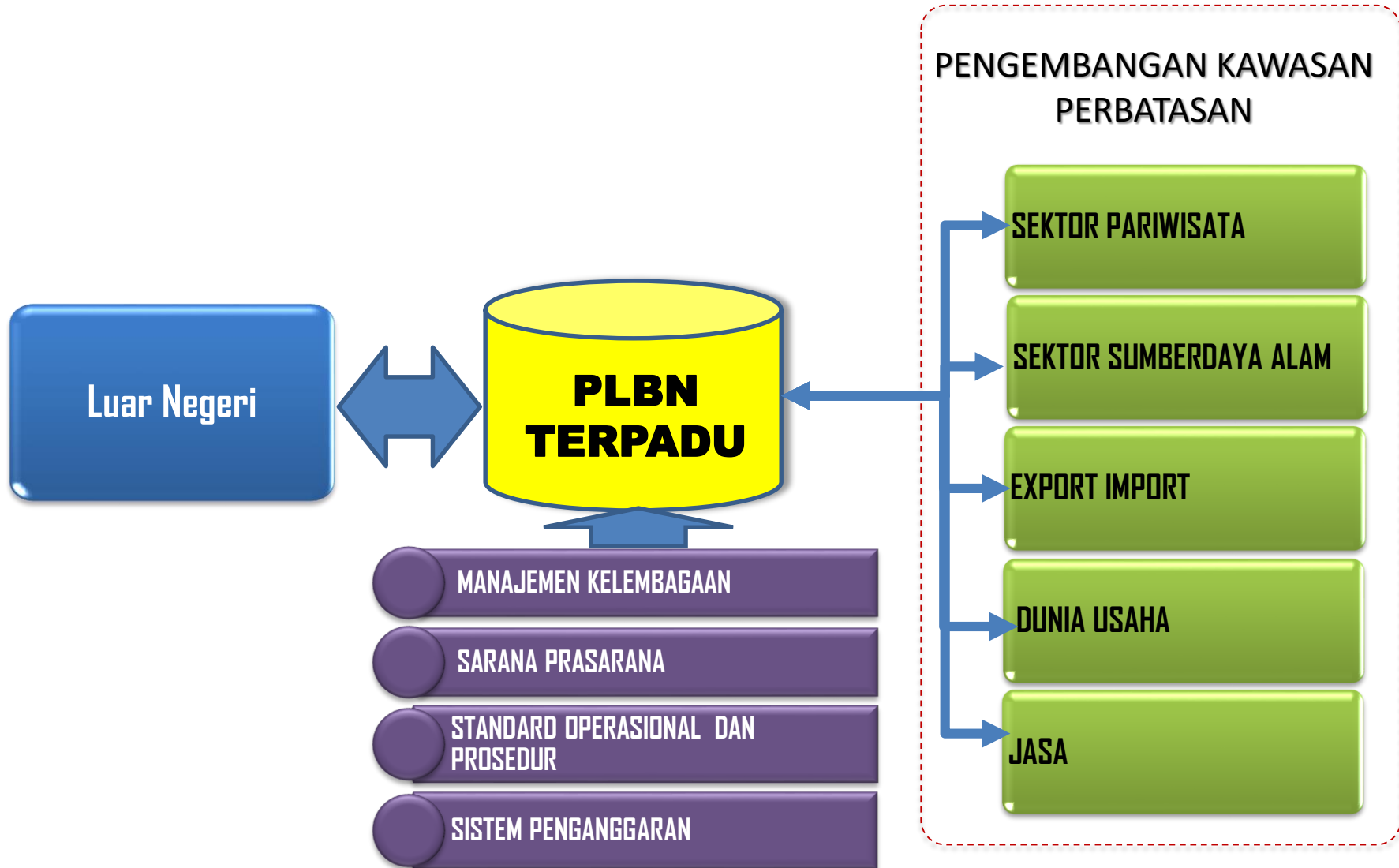
**Polsus
Perbatasan**

← - - → Garis koordinasi
→ Garis Tugas





PLBN SEBAGAI SIMPUL PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN



KAWASAN PLBN SEBAGAI *EPICENTRUM* PENGEMBANGAN EKONOMI DI KAWASAN PERBATASAN



 Kawasan PLBN

 PLBN



Tempat Pemeriksaan dan Pelayanan Utama (Zona Inti – CIQ)



Tempat Pelayanan Penunjang PLBN

 Kws. Pendukung PLBN

KONSEPSI PENGEMBANGAN PLBN

PLBN Terpadu

KONEKTIVITAS

- Jalan Nasional menuju perbatasan
- Jalan Paralel sepanjang perbatasan
- Jalan Non Status/Strategis Daerah

EFEKTIVITAS MANAJEMEN PLBN dan DRY PORT

- Unit Pengelola PLBN
- Integrasi Pengelolaan PLBN dan Dry Port
- SDM Pengelola CIQS dan Dry Port
- Kawasan Perdagangan

BARANG/ KOMODITAS INDONESIA

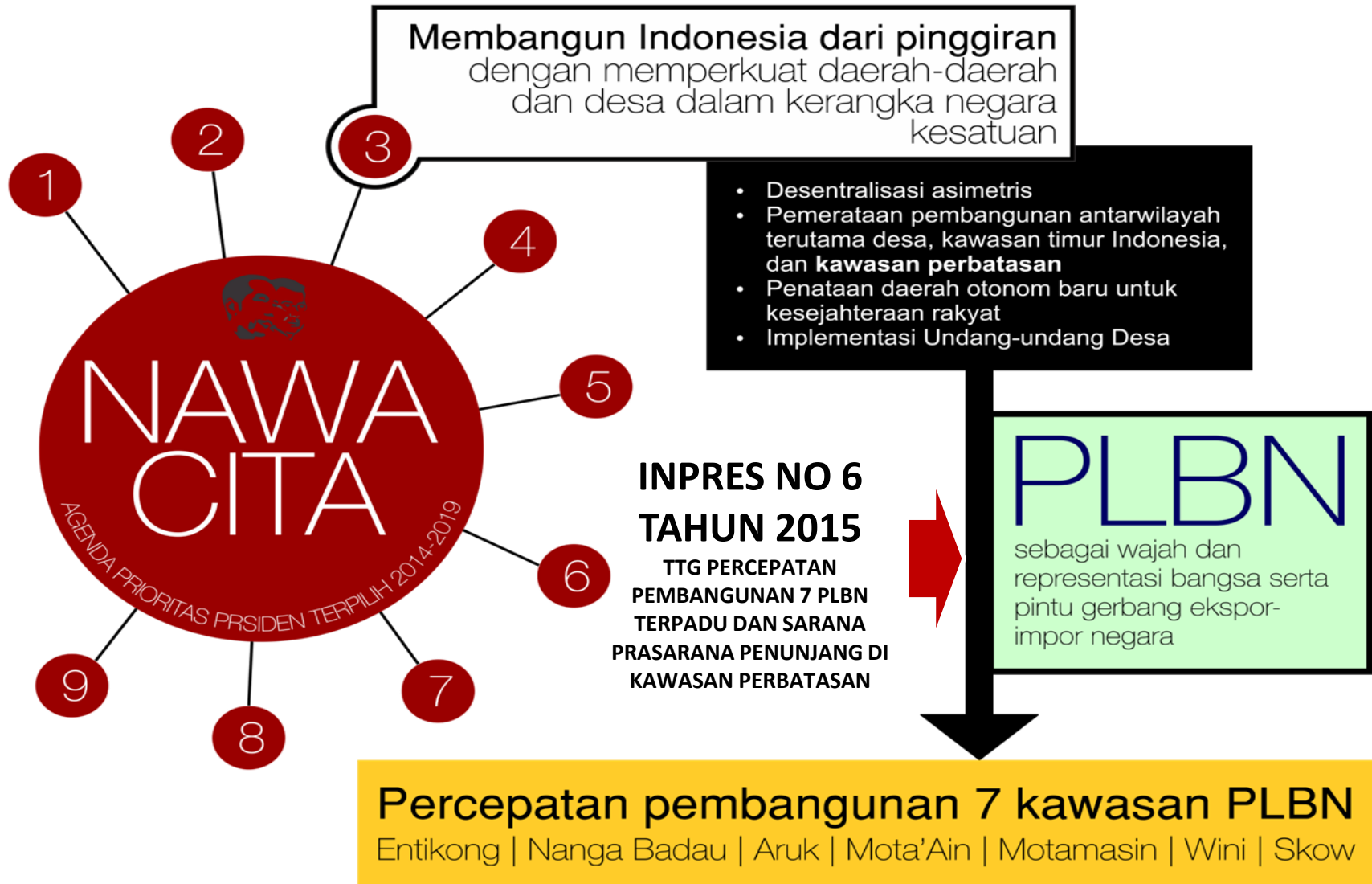
- Pengembangan Kawasan Perbatasan : untuk meningkatkan produktivitas komoditas daerah dan hasil olahan komoditas



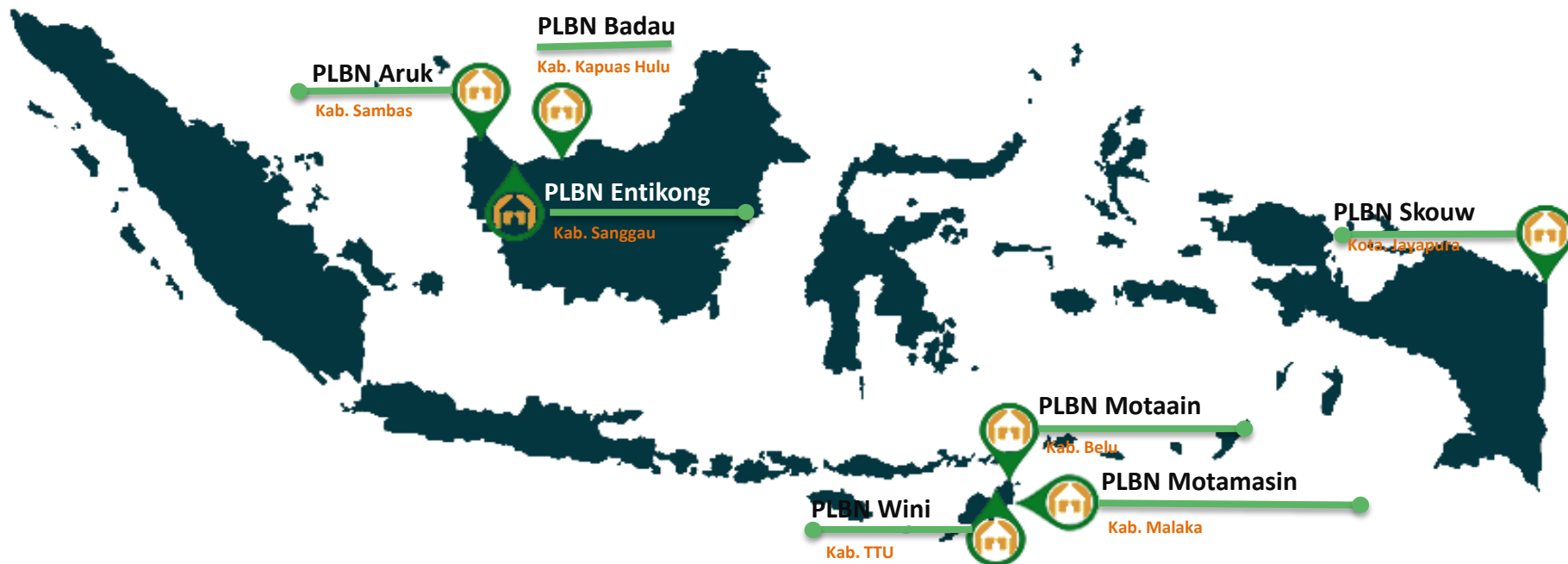
PEMBANGUNAN POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN)



MENJADIKAN **PLBN** SEBAGAI PINTU GERBANG NEGARA YANG AMAN, NYAMAN, DAN RAMAH INVESTASI



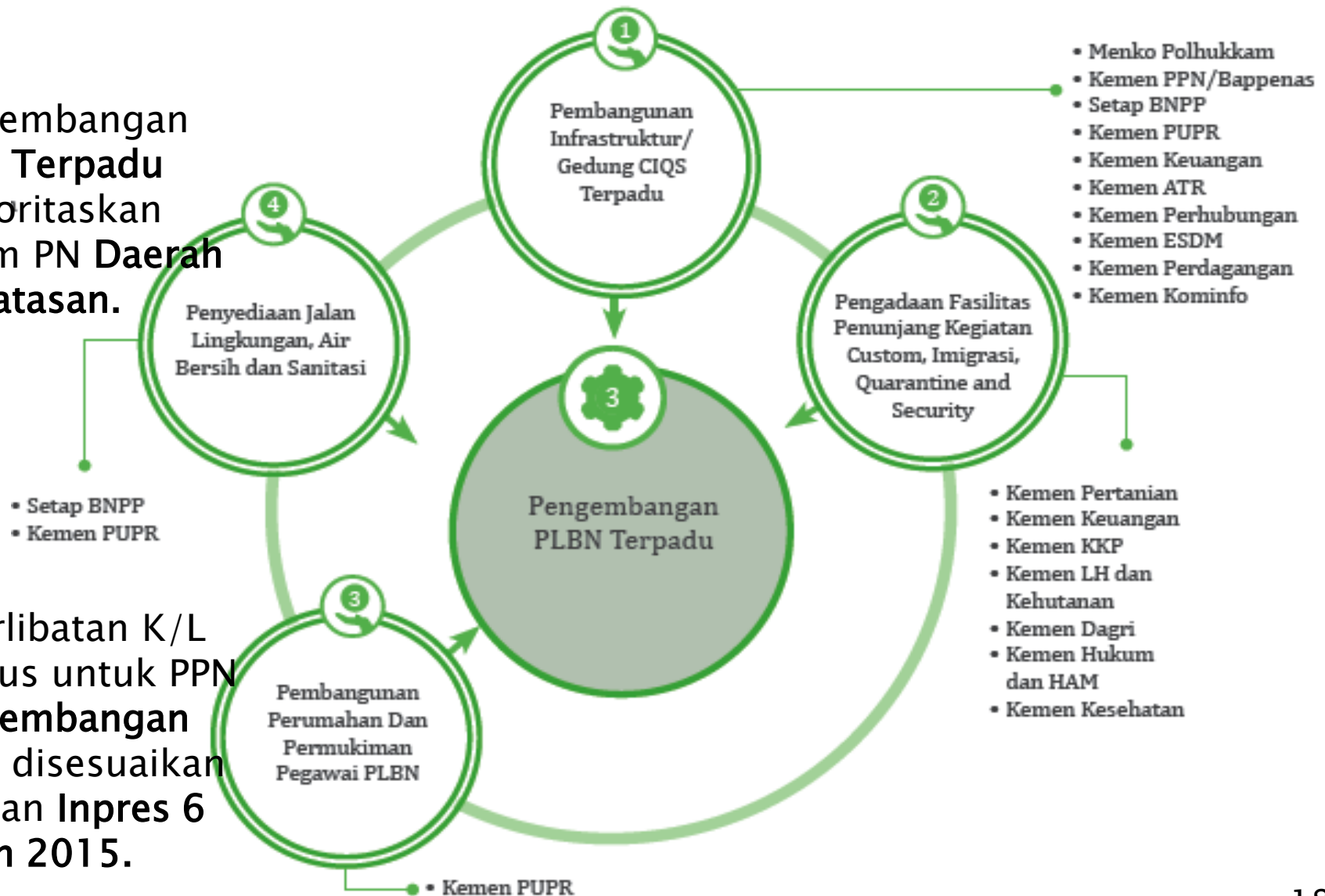
LOKASI DAN KONDISI AWAL 7 PLBN



KETERPADUAN DALAM PEMBANGUNAN 7 PLBN

PPN
Pengembangan
PLBN Terpadu
diprioritaskan
dalam PN Daerah
Perbatasan.

Keterlibatan K/L
khusus untuk PPN
Pengembangan
PLBN disesuaikan
dengan Inpres 6
tahun 2015.



HASIL PEMBANGUNAN 7 PLBN (TAHAP I)



**PLBN ENTIKONG DIRESMIKAN
PRESIDEN RI (21 DES 2016)**



**PLBN BADAU DIRESMIKAN
PRESIDEN RI (16 MARET 2016)**



**PLBN SKOUW DIRESMIKAN
PRESIDEN RI (9 MEI 2017)**



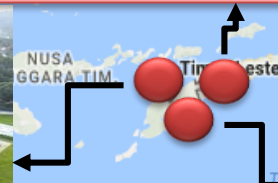
**PLBN ARUK DIRESMIKAN
PRESIDEN RI (17 MARET 2016)**



**PLBN MOTAAIN DIRESMIKAN
PRESIDEN RI (28 DES 2016)**



**PLBN WINI DIRESMIKAN
PRESIDEN RI (9 JANUARI 2018)**



**PLBN MOTAMASIN DIRESMIKAN
PRESIDEN RI (9 JANUARI 2018)**

PERESMIAN PLBN ARUK (TAHAP 1)

ARUK

KABUPATEN
SAMBAS
KALIMANTAN BARAT



FOTO KEGIATAN



BANGUNAN UTAMA PLBN



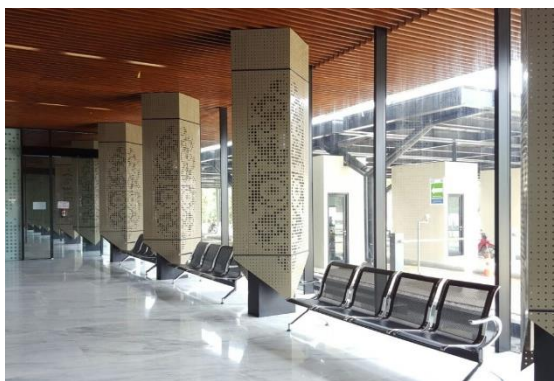
FINISHING TULISAN ARUK



AKTIVITAS PLBN



SUASANA AREA PLBN



INTERIOR PLBN



INTERIOR PLBN

PERESMIAN PLBN ENTIKONG (TAHAP 1)



FOTO PROGRES PEMBANGUNAN



POS LINTAS AREA KEBERANGKATAN



BANGUNAN UTAMA PLBN ENTIKONG



LANDSCAPE KAWASAN PLBN TERPADU ENTIKONG



BIRD EYE VIEW BANGUNAN KARGO



POS LINTAS AREA KEDATANGAN



BANGUNAN UTAMA PLBN ENTIKONG

PERESMIAN PLBN NANGA BADAU (TAHAP 1)



FOTO KEGIATAN



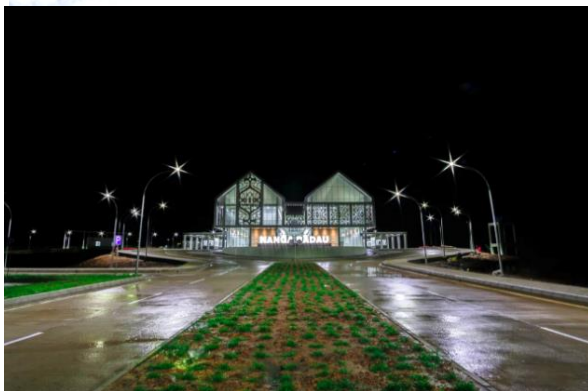
BANGUNAN UTAMA PLBN



BANGUNAN UTAMA PLBN



MONUMEN TASBARA



BANGUNAN UTAMA TAMPAK DEPAN



INTERIOR PLBN



PEMERIKSAAN PLBN

PERESMIAN PLBN MOTAAIN (TAHAP 1)



FOTO KEGIATAN



BANGUNAN
KEBERANGKATAN



INTERIOR RESEPSIONIS
BORDER GATE



BANGUNAN UTAMA
PLBN TERPADU MOTAAIN



KAWASAN PLBN MOTAAIN



BIRD EYE VIEW KAWASAN PLBN MOTAAIN



GERBANG PLBN TERPADU MOTAAIN

PLBN POS LINTAS
BATAS NEGARA

MOTAMASIN

KABUPATEN MALAKA, NUSA TENGGARA TIMUR



FOTO KEGIATAN



BIRD EYE VIEW BANGUNAN UTAMA



MONUMEN PANCASILA



GERBANG TASBRA



BANGUNAN KLINIK



PEKERJAAN PEDESTRIAN DAN LANSEKAP



INTERIOR BANGUNAN UTAMA

PLBN POS LINTAS
BATAS NEGARA

WINI

KABUPATEN TTU, NUSA TENGGARA TIMUR



FOTO KEGIATAN



BIRD EYE VIEW BANGUNAN UTAMA



BANGUNAN UTAMA PLBN



BANGUNAN LOPPO



INTERIOR BANGUNAN UTAMA



MONUMEN GARUDA



BANGUNAN POS POLRI

PLBN POS LINTAS
BATAS NEGARA

SKOUW

KOTA JAYAPURA, NUSA TENGGARA TIMUR



FOTO KEGIATAN



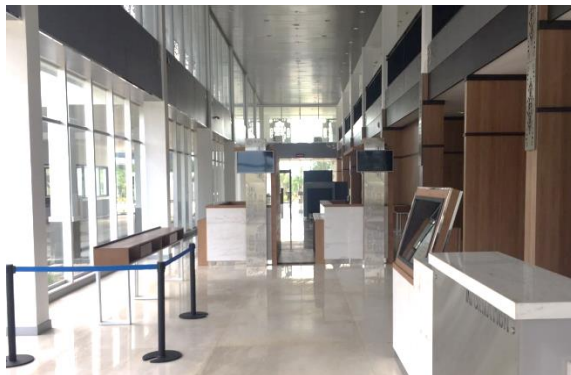
BANGUNAN UTAMA



BIRD EYE VIEW PLBN TERPADU SKOUW



BANGUNAN KLINIK



INTERIOR BANGUNAN UTAMA



BANGUNAN UTAMA



PEDESTRIAN PLBN TERPADU SKOUW



**PEMBANGUNAN 7 PLBN
(TAHAP II)
ZONA PENDUKUNG**

PLBN

POS LINTAS
BATAS NEGARA

ARUK

KABUPATEN
SAMBAS
KALIMANTAN BARAT

SITEPLAN ZONA PENDUKUNG PLBN ARUK



PLBN

POS LINTAS
BATAS NEGARA

ARUK

KABUPATEN
SAMBAS
KALIMANTAN BARAT

Pasar Wisata



Rest Area



Food Court



PLBN

POS LINTAS
BATAS NEGARA

ENTIKONG

KABUPATEN
SANGGAU
KALIMANTAN BARAT

SITEPLAN ZONA PENDUKUNG PLBN ENTIKONG



PLBN

POS LINTAS
BATAS NEGARA

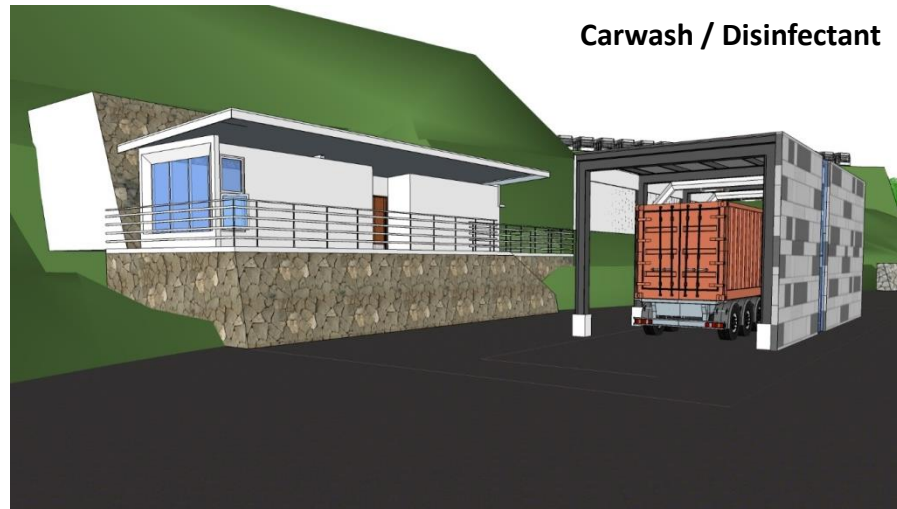
ENTIKONG

KABUPATEN
SANGGAU
KALIMANTAN BARAT

Kantor Pengelola



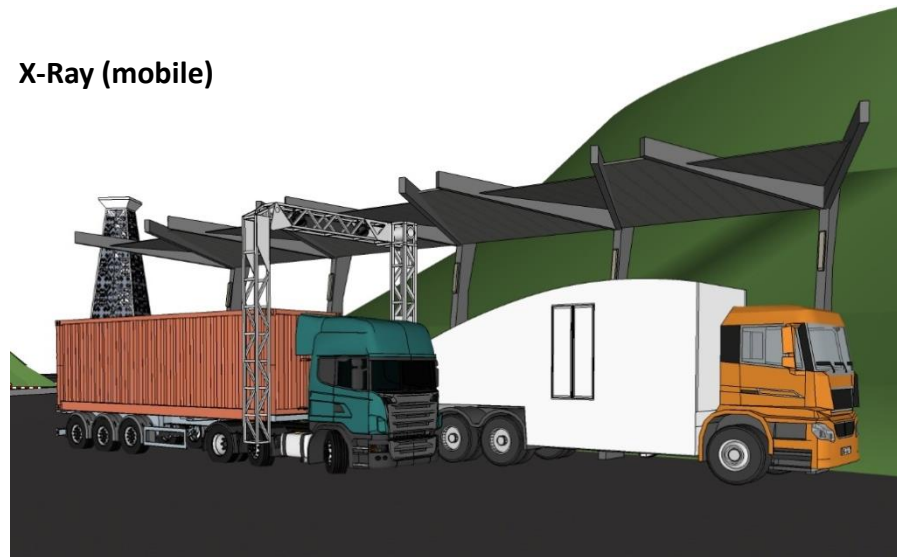
Carwash / Disinfectant



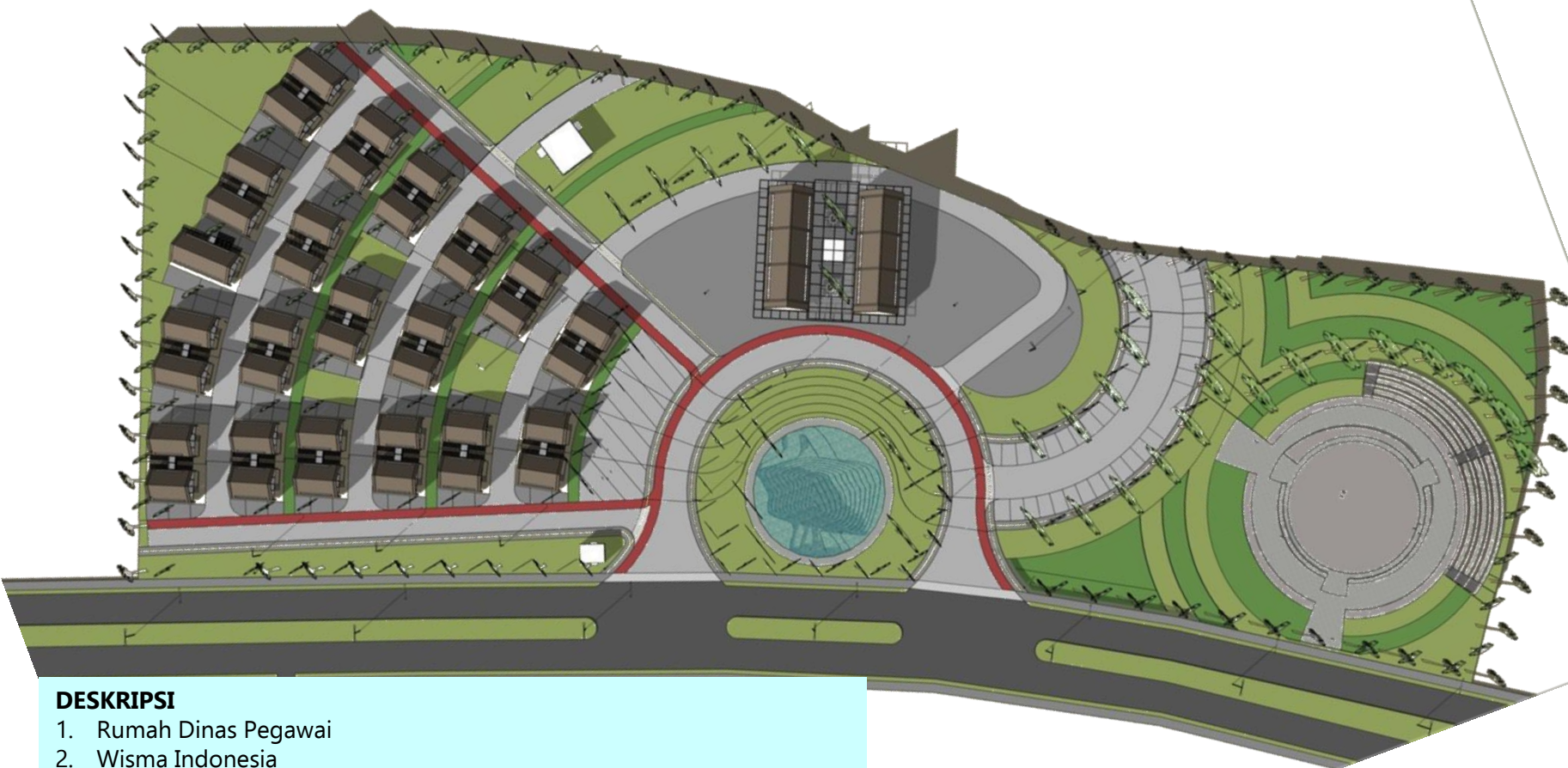
Klinik / Karantina Kesehatan



X-Ray (mobile)



SITEPLAN ZONA PENDUKUNG PLBN BADAU



DESKRIPSI

1. Rumah Dinas Pegawai
2. Wisma Indonesia
3. Gedung Serbaguna
- 4. Pasar Perbatasan**
5. Rumah Ibadah
6. Rest Area
7. Parkir kendaraan

UNIT RUMAH PEGAWAI PENGELOLA PLBN BADAU



SITE PLAN ZONA PENDUKUNG PLBN MOTAAIN

DESKRIPSI

Pembangunan Zona Sub Inti dan Pendukung PLBN berupa:

1. Mess Pegawai
2. Wisma Indonesia
3. Pasar Perbatasan
4. Gereja
5. Rest Area
6. Lapangan Olahraga
7. Pos Pamtas TNI
8. Pos Polri
9. Carwash / Desinfektant (zona inti)
10. Mobile X-Ray (zona inti)



PLBN

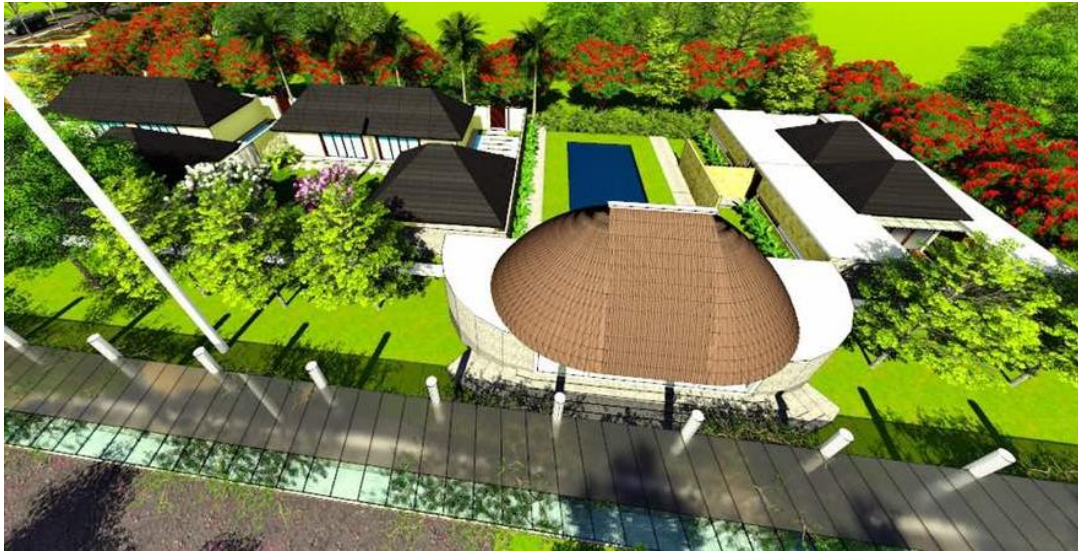
POS LINTAS
BATAS NEGARA

MOTAAIN

KABUPATEN
BELU
NUSA TENGGARA TIMUR

Wisma Indonesia

SITE PLAN ZONA PENDUKUNG PLBN MOTAAIN



Wisma Indonesia

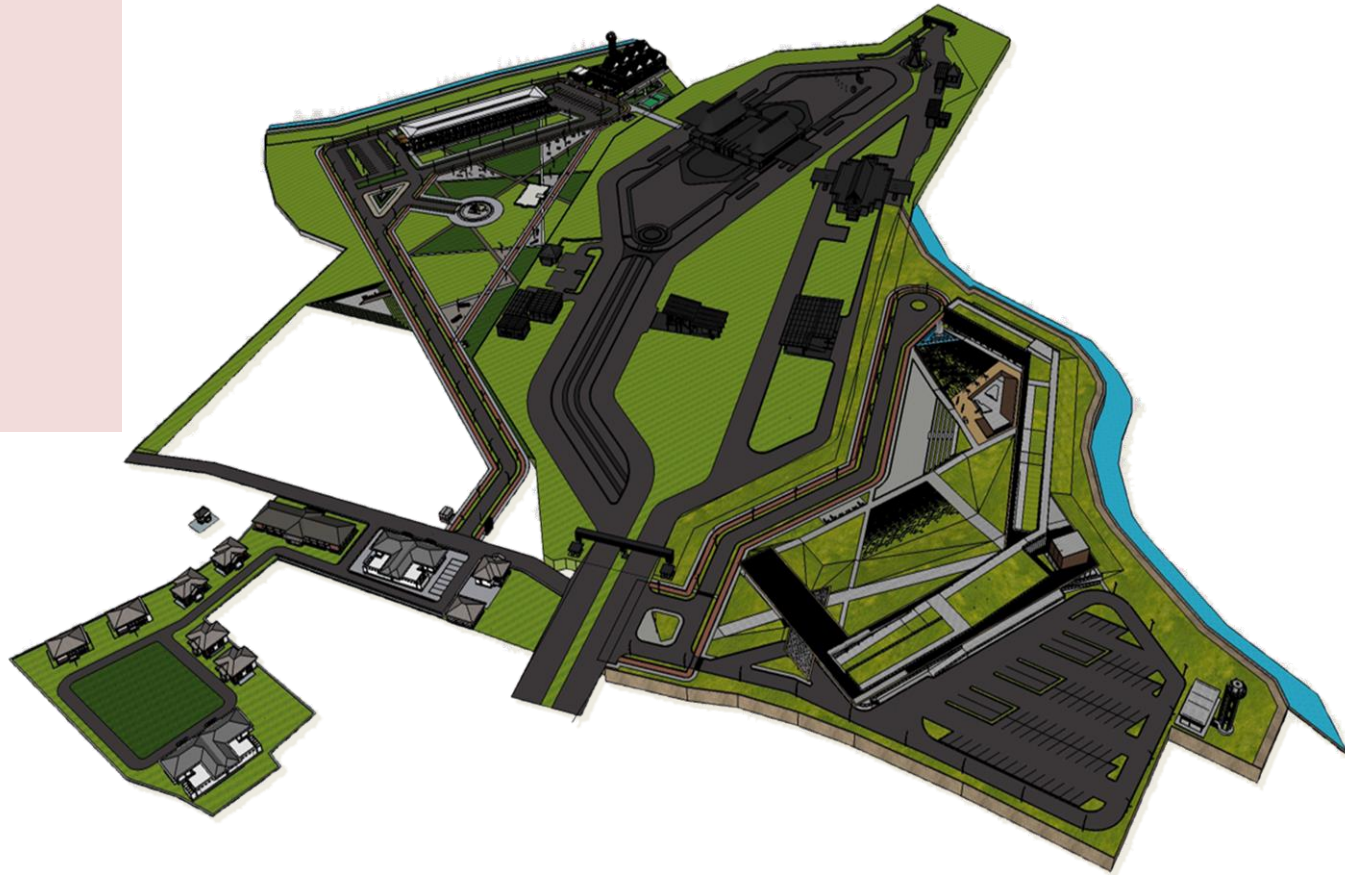


Mess Pegawai

SITEPLAN ZONA PENDUKUNG PLBN MOTAMASIN

DESKRIPSI

1. Kantor dan Ruang Bersama
2. Mess Pegawai
3. Wisma Indonesia
4. Pasar Perbatasan
5. Foodcourt
6. Tempat Ibadah
7. Rest Area
8. Parkir kendaraan
9. Helipad
10. Pos Polri



PLBN

POS LINTAS
BATAS NEGARA

MOTAMASIN

KABUPATEN
MALAKA
NUSA TENGGARA TIMUR

SITEPLAN ZONA PENDUKUNG PLBN MOTAMASIN

Pasar Perbatasan



PLBN

POS LINTAS
BATAS NEGARA

WINI

KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
NUSA TENGGARA TIMUR

SITEPLAN KAWASAN PLBN WINI



ZONA PENDUKUNG PLBN WINI



ZONA PENDUKUNG PLBN WINI

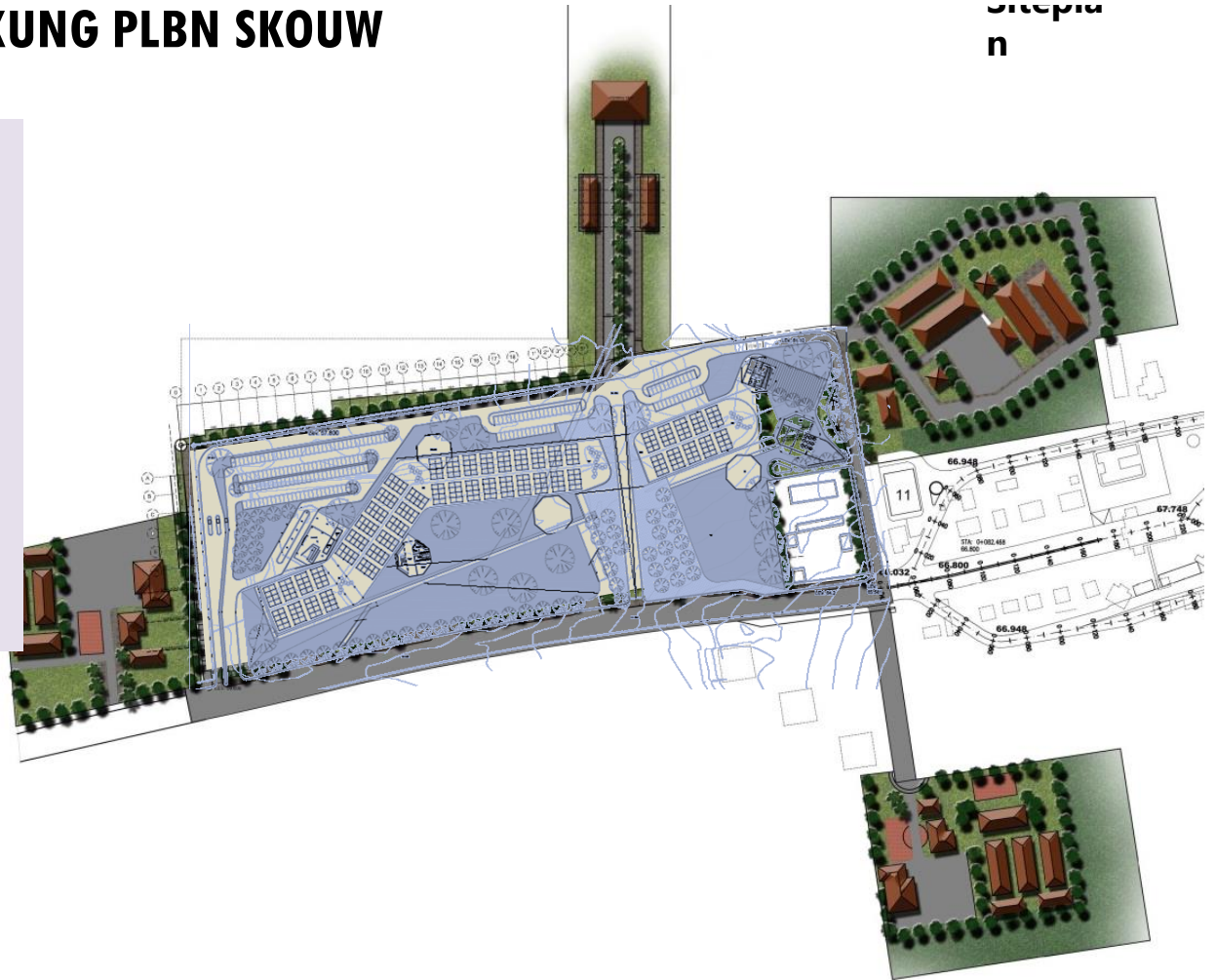


SITEPLAN ZONA PENDUKUNG PLBN SKOUW

DESKRIPSI

Pembangunan Zona Sub Inti dan Pendukung

1. Rumah Dinas Pegawai
2. Wisma Indonesia
3. Gedung Serbaguna
4. **Pasar Perbatasan**
5. Foodcourt
6. Masjid
7. Gereja
8. Rest Area
9. Parkir kendaraan
10. Pos Pantas TNI
11. Pos Polri



SITEPLAN ZONA PENDUKUNG PLBN SKOUW



Perspektif pasar Perbatasan
PLBN Skouw

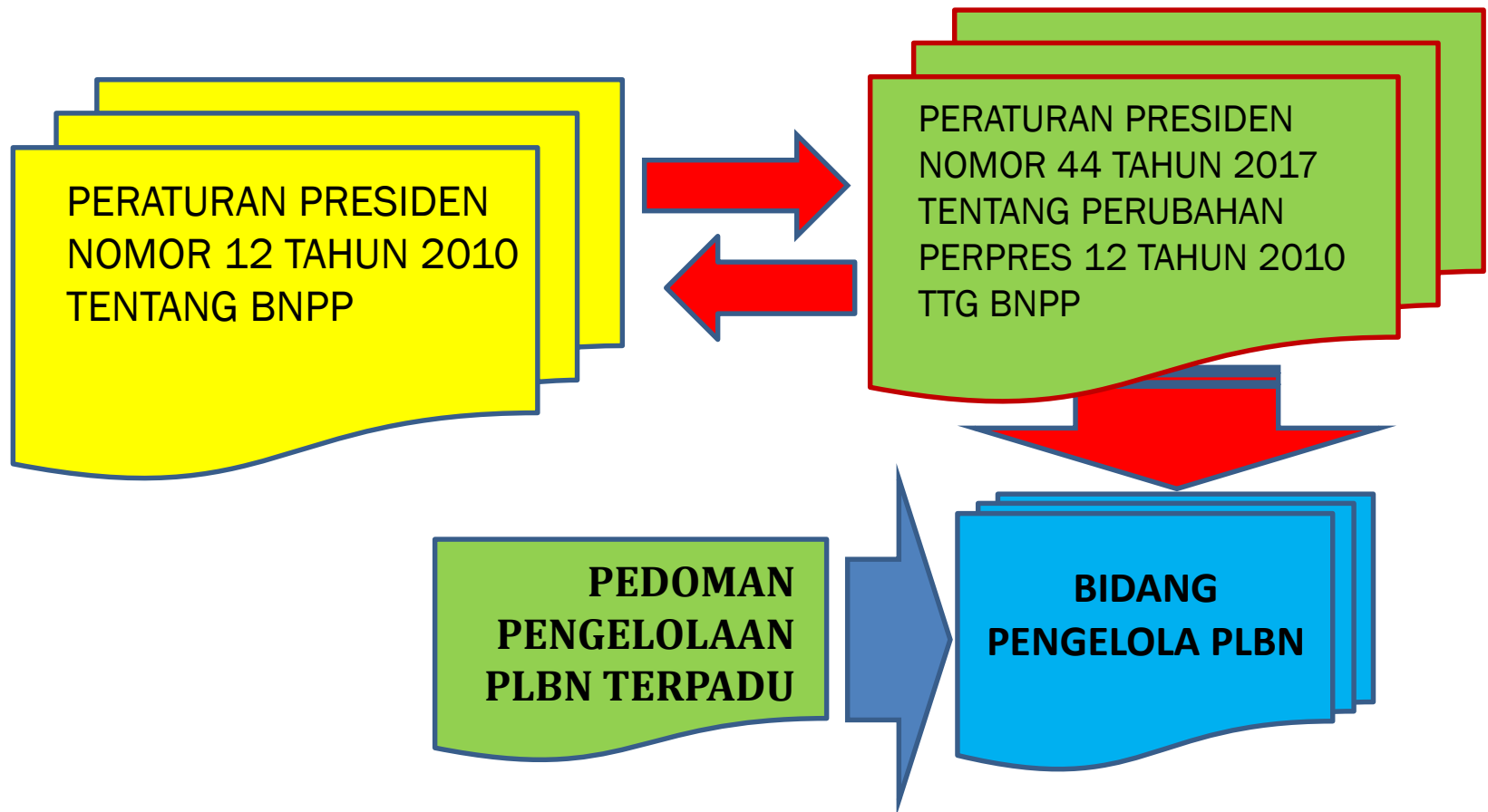




**KELEMBAGAAN
UNIT PENGELOLA
POS LINTAS BATAS NEGARA**



PENYESUAIAN REGULASI YANG MENGATUR KELEMBAGAAN BNPP



PERPRES 44 TAHUN 2017 → BNPP

ANGOTA BNPP

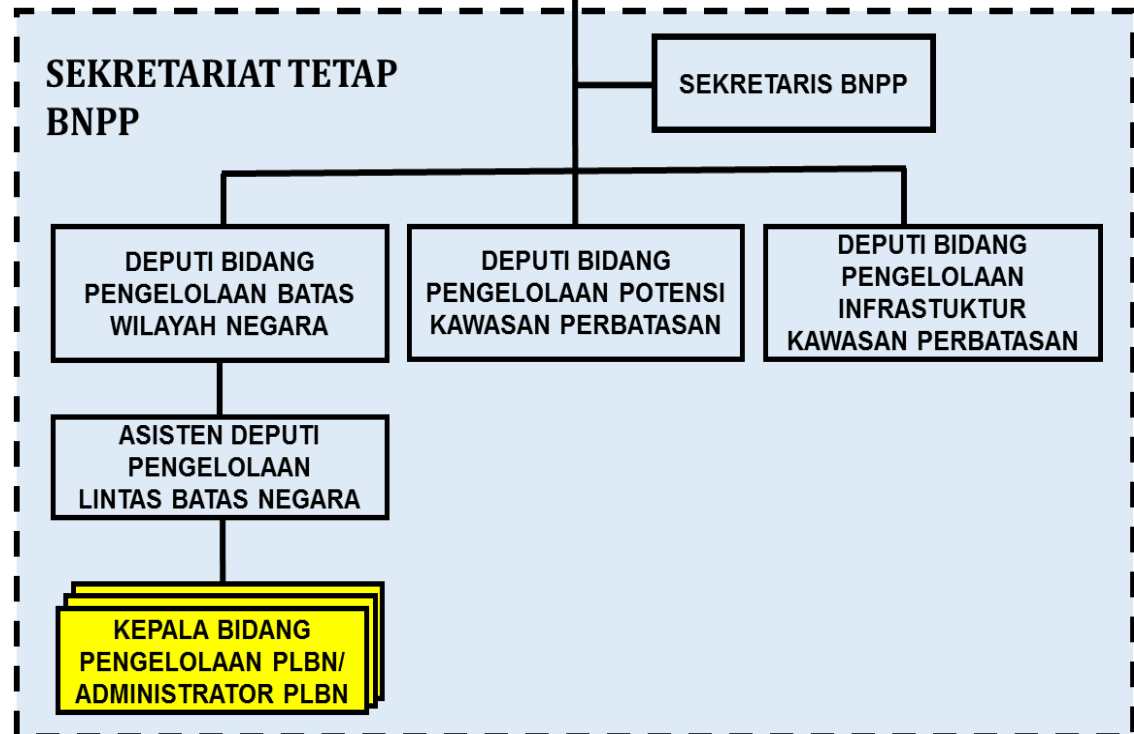
PENGARAH BNPP:

1. Ketua Pengarah: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Wakil Ketua Pengarah I: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Wakil Ketua Pengarah II: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan .
4. Wakil Ketua Pengarah III: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

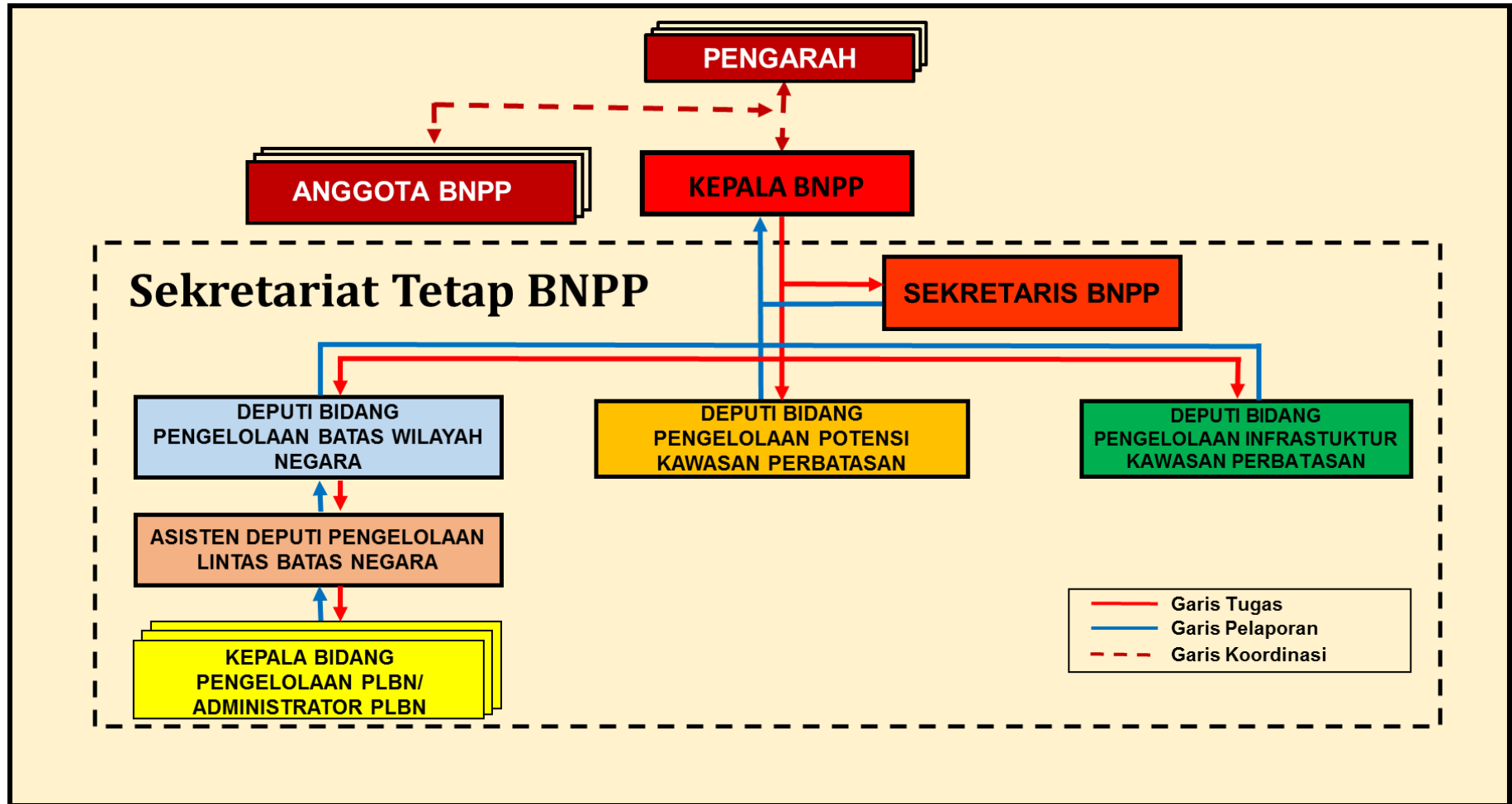
ANGGOTA BNPP:

1. Menteri Luar Negeri
2. Menteri Pertahanan
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Menteri Kesehatan.
7. Menteri Perindustrian.
8. Menteri Perdagangan.
9. Menteri ESDM.
10. Menteri PUPR
11. Menteri Perhubungan
12. Menteri Komunikasi dan Informatika.
13. Menteri Pertanian.
14. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
15. Menteri Kelautan dan Perikanan
16. Menteri Desa , PDT dan Transmigrasi.
17. Menteri ATR/Kepala BPN.
18. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
19. Menteri BUMN.
20. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
21. Panglima TNI.
22. Kapolri RI.
23. Kepala BIN.
24. Kepala BNN.
25. Kepala Badan Informasi Geospasial.
26. Kepala BNPT.
27. Kepala Bakamla.
28. Gubernur yang memiliki wilayah perbatasan negara (13 Gubernur)

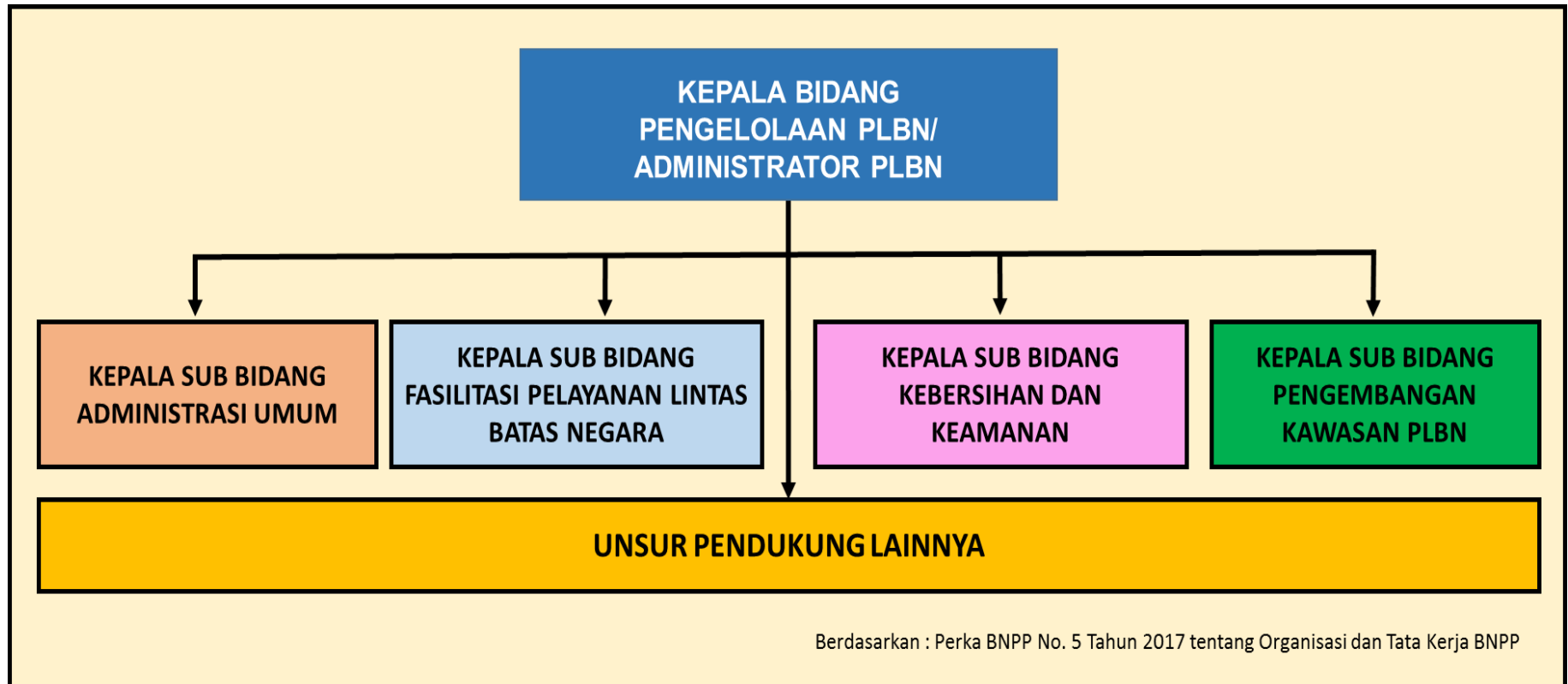
KEPALA BNPP : MENTERI DALAM NEGARI



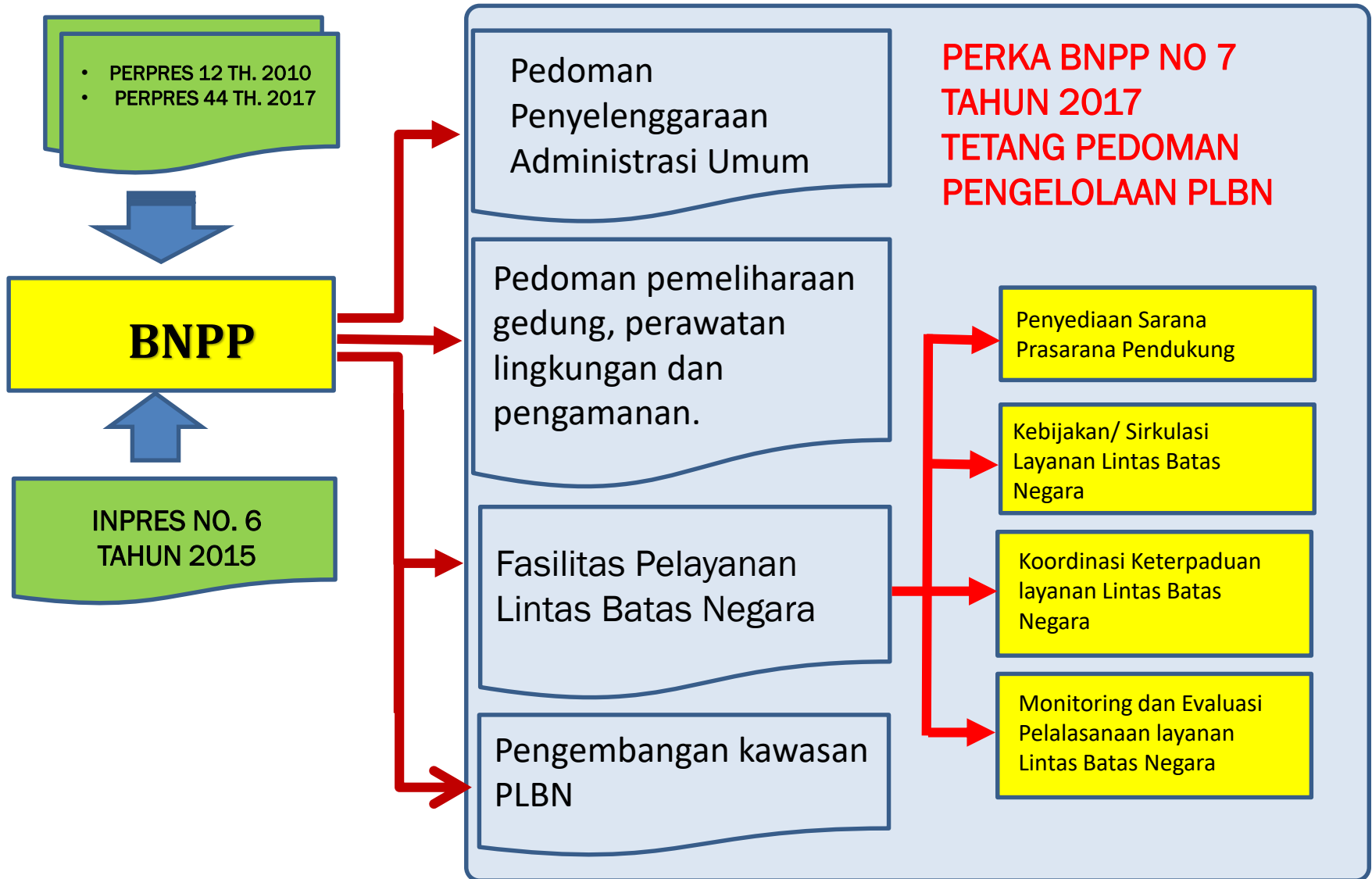
BAGAN KELEMBAGAAN UNIT PENGELOLA POS LINTAS BATAS NEGARA



BAGAN STRUKTUR UNIT PENGELOLA PLBN TERPADU



KEBIJAKAN PENGELOLAAN PLBN TERPADU



**RENCANA
PEMBANGUNAN PLBN
GELOMBANG II (PASCA INPRES6/2015)**



RENCANA PEMBANGUNAN PLBN GELOMBANG II

(PASCA INPRES 6/015)

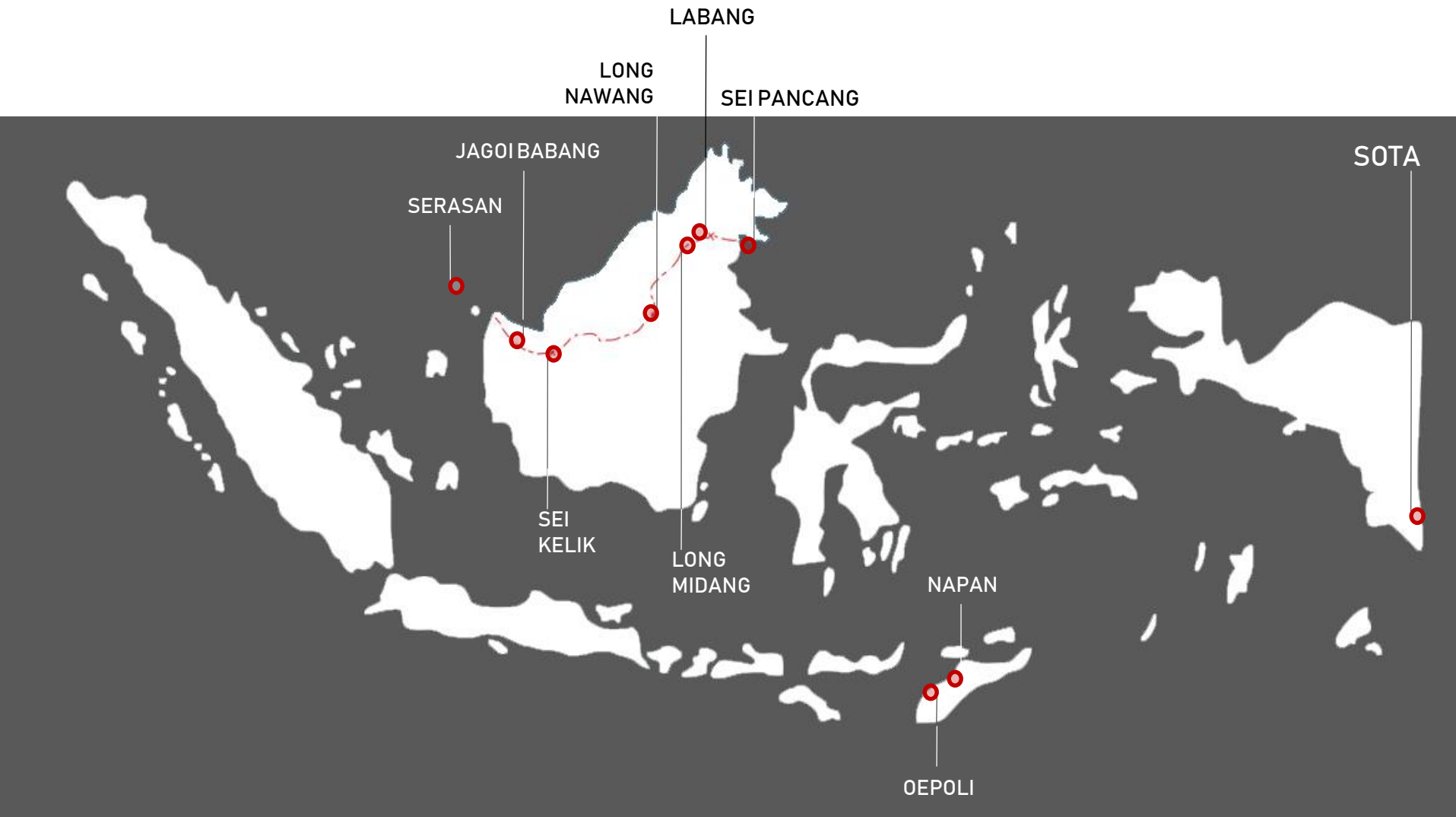
a. Prioritas 1:

- 1) Sei Pancang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara**
- 2) Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat**
- 3) Sota, Kabupaten Merauke, Papua**
- 4) Long Midang / Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara**

b. Prioritas 2:

- 1) Long Nawang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara**
- 2) Labang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara**
- 3) Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau**
- 4) Sei Kelik / Jasa, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat**
- 5) Napan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Tengah**
- 6) Oepoli, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Tengah**

PETA PENYEBARAN LOKASI 10 PLBN (GELOMBANG II)





BEBERAPA AGENDA/KESEPAKATAN PENGEMBANAGAN TATA KELOLA TASBARA



UPAYA PEMANTAPAN SISTEM TATA KELOLA LINTAS BATAS NEGARA

POKOK-POKOK KESEPAKATAN (RENCANA TINDAK LANJUT) RAPAT FASILITASI DAN KOORDINASI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA JAKARTA, 26 APRIL 2017

Pada tanggal Dua Puluh Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, telah dilaksanakan Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Lintas Batas Negara, di Jakarta, dengan pokok-pokok kesepakatan sebagai Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan kepada Masyarakat perbatasan dalam tertib administrasi dan dokumen pelintas batas negara dalam aktifitas lintas batas sesuai dengan kesepakatan kedua Negara atau dokumen lainnya.
2. Penambahan petugas imigrasi sesuai dengan kebutuhan pelayanan di masing-masing PLBN dan Non PLBN atau penugasan lainnya.
3. Penataan penanganan lintas batas barang dan kendaraan yang melalui PLBN.
4. Penataan mekanisme pelintas batas perorangan dengan barang bawaan yang disesuaikan dengan jenis/moda kendaraan yang digunakan (pribadi: diperiksa didalam kendaraan atau di counter pemeriksaan; kendaraan umum: penumpang turun).
5. Menetapkan mekanisme koordinasi penggunaan dokumen Pas Lintas Batas (PLB) dan Kartu Identitas Lintas Batas.
6. Melakukan sosialisasi dan membuat media informasi (*leaflet/ booklet/ papan informasi*) terkait barang-barang yang dilarang melintas melalui PLBN/ Non PLBN.
7. Menerbitkan regulasi/ petunjuk teknis yang mengatur tentang mekanisme pelayanan lintas batas kendaraan (pribadi/umum/ kargo) yang melalui PLBN.
8. Menyediakan moda transportasi/ pembukaan jalur dan ijin trayek kendaraan angkutan umum pelayanan perlintasan orang dan barang yang melalui PLBN.
9. Menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan kendaraan lintas batas yang melalui PLBN.
10. Menyiapkan instrumen koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga lain serta Menjalin kemitraan dengan institusi yang terkait dengan kegiatan lintas batas kendaraan yang melalui PLBN.
11. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam penanganan pelanggaran lalu lintas kendaraan melalui PLBN.
12. Melakukan perundingan bilateral terkait ketentuan yang mengatur perdagangan perbatasan (*border trade*) dan *export import* melalui PLBN.
13. Mendorong penyelesaian revisi Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 36 tahun 1995.
14. Melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga lain serta menjalin kemitraan dengan institusi yang terkait dengan kegiatan *export import* di kawasan PLBN.
15. Penyiapan kebijakan (arah pengalokasian anggaran) pembangunan pasar perbatasan di PLBN.
16. Menyiapkan anggaran pembangunan terminal penumpang dan barang di kawasan PLBN dengan pola penganggaran seperti pembangunan gedung PLBN (sekaligus untuk 7 lokasi dan bersifat tahun jamak).



Jakarta, 26 April 2017

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. Robert Simbolon, MPA	Pit. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP	
2.	Saifullah Nasution, SH, MM	Kakanwil Kalimantan Bagian Barat, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan	
3.	Agustinus Naon, S.Sos	Wakil Bupati Bengkayang	
4.	Drs. Hongky Juanda, M.Si	Kasubdit TPI, Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM	
5.	Nina Damajanti, SE, M. APPEC	Kasubdit. Asia Tenggara dan Pasifik, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan	
6.	Ardiono, ATD, MM	Kasubdit. Terminal Angkutan Jalan, Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan	
7.	A. Yani, ATD, M.T	Kasubdit. Angkutan Orang, Direktur Angkutan dan Multimoda, Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan	
8.	Drs. Edi S. Nasution	Kasubdit. Batas Negara dan Pulau Terluar, Ditjen Bina Akwil, Kemdagri.	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
9.	Letkol Hadi Setiawan	Paban 6 SOPS TNI	
10.	Muhammad Royani, SH	Waka Polres Bengkayang	
11.	Amri Marpaung	Danramil 17/1202 SKW Kodam XII/ TPR, Kodim 1202/ SKW Bengkayang	
12.	Yustinus, SE, MM	Camat Jagoi Babang	



RENCANA PEMBANGUNAN PLBN GELOMBANG II

POKOK-POKOK KESEPAKATAN

RAPAT PENYUSUNAN/PENETAPAN KEBIJAKAN

PROGRAM PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA

(Rencana Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Gelombang Ke-2/
Pasca Inpres 6/2015)

JAKARTA, 25 AGUSTUS 2017

Pada hari ini, Jumat, tanggal Dua Puluh Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, telah dilaksanakan Rapat Penyusunan/Penetapan Kebijakan Program Pengelolaan Lintas Batas Negara, dengan fokus pembahasan Rencana Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Gelombang Ke-2 (Pasca Inpres Nomor 6 Tahun 2015). Setelah mempertimbangkan beberapa aspek dan merujuk beberapa sumber resmi, rapat menyepakati untuk dilaksanakannya Pembangunan PLBN Gelombang Ke-2/Pasca Inpres Nomor 6 Tahun 2015, dengan pokok-pokok kesepakatan sebagai berikut:

1. Pembangunan PLBN Gelombang Ke-2 akan dilakukan pada lokasi:

- Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Jasa-Sei Kelik, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Long Nawang, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.
- Long Midang, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Labang, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Sei Nyamuk-Sei Pancang, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Oepoli, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Waris, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;

Catatan:

- Terkait dengan Labang dan Oepoli, perlu dilakukan konfirmasi/pendalaman lebih lanjut dalam konteks proses penyelesaian OBP/*unresolved segment*.

2. Terhadap rencana pembangunan PLBN di 9 (sembilan) lokasi di atas, Rapat merekomendasikan kepada:

a. BNPP untuk:

- menyiapkan rancangan Instruksi Presiden sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan;
- menyiapkan rancangan Peraturan Kepala BNPP tentang *Masterplan* 9 (sembilan) PLBN Terpadu di atas;

- mengoordinasikan kementerian/lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka tindak lanjut pembangunan 9 (sembilan) PLBN Terpadu.

b. Kementerian PUPR untuk:

- menyiapkan bahan penyusunan *masterplan* 9 (sembilan) PLBN Terpadu dan sarana prasarana penunjang, serta pengembangan kawasan pemukiman di perbatasan;
- menyusun DED Pembangunan 9 (sembilan) PLBN Terpadu dan sarana prasarana penunjang, serta pengembangan kawasan pemukiman di perbatasan;
- menyiapkan usulan anggaran untuk mendanai pembangunan 9 (sembilan) PLBN Terpadu dan sarana prasarana penunjang, serta pengembangan kawasan pemukiman di perbatasan;
- menyusun rencana pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang di wilayah perbatasan.

c. Kementerian Dalam Negeri untuk:

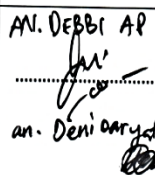
- melakukan kerja sama dengan negara tetangga dalam penetapan *exit/entry points* dan menyepakati pembangunan PLBN Terpadu;
- melakukan langkah-langkah koordinasi penyiapan lahan dan penyelesaian status aset di lokasi pembangunan 9 (sembilan) PLBN Terpadu dan sarana prasarana penunjang, serta pengembangan kawasan pemukiman di perbatasan;

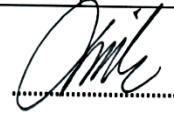
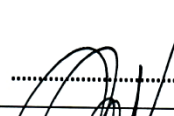
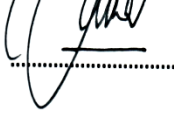
- Rapat menyarankan agar penyiapan rencana pembangunan 9 (Sembilan) PLBN Terpadu dan sarana prasarana penunjang, serta pengembangan kawasan pemukiman di perbatasan dapat diselesaikan paling lambat tahun 2018 sehingga pembangunan secara fisik dapat dimulai paling lambat tahun 2019.

- Dalam rangka persiapan pelaksanaan kesepakatan ini, BNPP perlu mengagendakan pelaksanaan peninjauan lapangan terpadu dengan mengikutsertakan seluruh instansi terkait. Untuk itu, perlu dilakukan pertemuan lanjutan untuk pembahasan rencana teknis pelaksanaan peninjauan lapangan.



Jakarta, 25 Agustus 2017:

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. Robert Simbolon, MPA	Pit. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP	
2.	Yasid Sulistya, S. Sos, M. Si	Asisten Deputi Koordinasi Wiltas dan Tata Ruang Pertahanan Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	AN. DEBBI AP  an. Deni aaryanto
3.	Edi S. Nasution, SE, MAP	Kasubdit. Batas Antar Negara dan Pulau-pulau Terluar, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri	
4.	Aswin G. Sukahar, ST, MB. Env	Kasubdit. Kawasan Khusus, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
5.	Choirul Anwar	Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan	
6.	Susilo Yanuardi	Kasubbid. Perbatasan pada Sekretariat Kabinet	
7.	Nurdhina	Kasubbid. Daerah Perbatasan Kepulauan, Sekretariat Negara	
8.	Ferdi Maulana	Kasi. Pos Lintas Batas dan Tempat Lainnya, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM	



PERSIAPAN PEMBANGUNAN PLBN GELOMBANG II

POKOK-POKOK KESEPAKATAN RAPAT FASILITASI DAN KOORDINASI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA

(Persiapan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Gelombang Ke-2/
Pasca Inpres 6/2015)

JAKARTA, 22 NOVEMBER 2017

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua Puluh Dua Bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, telah dilaksanakan Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Lintas Batas Negara, dengan fokus pembahasan Persiapan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Gelombang Ke-2 (Pasca Inpres Nomor 6 Tahun 2015). Setelah mempertimbangkan beberapa aspek dan merujuk beberapa sumber resmi, rapat menyepakati untuk dilaksanakannya Persiapan Pembangunan PLBN Gelombang Ke-2/Pasca Inpres Nomor 6 Tahun 2015, dengan pokok-pokok kesepakatan sebagai berikut:

1. Tetap mendorong pembangunan PLBN Gelombang ke-2 (Pasca Inpres Nomor 6 Tahun 2015) sebagaimana surat Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP kepada Menteri PUPR Nomor 050/1733/BNPP Tanggal 15 September 2017 Perihal Rencana Pembangunan PLBN Gelombang ke-2 (Pasca Inpres Nomor 6 Tahun 2015).
- e. BNPP akan mengkoordinasikan percepatan pembangunan Terminal Barang Internasional Aruk dengan K/L terkait.
- f. Berkoordinasi dengan Ditjen Bea dan Cukai, Kemenkeu dalam proses penyiapan DED dan *siteplan* Terminal Barang Internasional dalam rangka menjadikan Terminal Barang Internasional sebagai kawasan pabean.
2. Implementasi PP Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia di PLBN Entikong dan di PLBN Motaain
 - a. Sosialisasi dilakukan selama bulan Maret 2018.
 - b. BNPP sebagai pengelola PLBN memberi dukungan yang dibutuhkan dengan tetap menjaga ketertiban aktifitas lintas batas negara.
3. Pengaturan Mekanisme Perdagangan Umum melalui PLBN/Rencana Revisi Kepmendag Nomor 36 Tahun 1995
 - a. Kemendag akan melakukan percepatan dalam penyelesaian Permendag tentang Mekanisme Perdagangan Ekspor dan Impor di PLBN.



Jakarta, 22 November 2017

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Robert Simbolon	Plt. Deputy Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP	
2.	Manaek Sihombing	Kepala Satker PKP Strategis, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR	
3.	Eddy Mus	Asisten Deputy Infrastruktur Fisik, BNPP	
4.	Rusly Baddu	Kabid Faslak dan Monev pada Asisten Deputy Pengelolaan Lintas Batas Negara, BNPP	
5.	Muhammad Bayu Mulyantono	PPK Pengembangan Kawasan Pemukiman Perbatasan, Satker PKP Strategis, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR	
6.	Nurdhina Amalia	Kasubbid Perbatasan, Kemensetneg	
7.	Susilo Yanuardi	Kasubbid Perbatasan pada Sekretariat Kabinet	
8.	Samuel ST Padan	Kepala Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara	

9.	Diah Lenggogeni	Plt. Kasubdit Daerah Tertinggal dan Rawan Bencana, BAPPENAS	
10.	Bambang R. T.	Staf Pemeriksa pada Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan	
11.	M. E. Budiastuti	JFT pada Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11.	Turhadi N	Kepala Bidang Non Benih, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian	
12.	Malfam Bioktava	Kasubbid Faslak pada Asisten Deputy Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, BNPP	
13.	Haerani	Kabid Faslak dan Monev pada Asisten Deputy Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, BNPP	
14.	Davi Warsyah	Kasubbid Kepatuhan Pengeluaran pada BKIPM, Kementerian Kelautan dan Perikanan	
15.	Arief Eka Riyanto	Kepala Seksi Tempat Pemeriksaan Imigrasi Udara, Ditjen Imigrasi, Kemenkumham	



TERMINAL BARANG INTERNASIONAL ARUK, PEMBERLAKUAN PNBP POLRI, DAN PERDAGANGAN UMUM MELALU PLBN

POKOK-POKOK KESEPAKATAN (RENCANA TINDAK LANJUT)

RAPAT FASILITASI DAN KOORDINASI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA JAKARTA, 6 MARET 2018

Pada tanggal Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah dilaksanakan Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Lintas Batas Negara, dengan pokok bahasan:

- a. Penentuan Lokasi Pembangunan Terminal Barang Internasional di Kawasan PLBN Aruk;
- b. Rencana Pemberlakuan PP Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia di PLBN Entikong dan di PLBN Motaain; dan
- c. Pengaturan Mekanisme Perdagangan Umum melalui PLBN/Rencana Revisi Kepmendag Nomor 36 Tahun 1995,

Dengan ini menyepakati pokok-pokok kesepakatan sebagai Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Pembangunan Terminal Barang Internasional di Kawasan PLBN Aruk
 - a. Penetapan lokasi disepakati pada lokasi yang direkomendasikan oleh Kemenhub yang sudah dilakukan *feasibility study* dan *Detailed Engineering Design* (DED).
 - b. Bupati Sambas memfasilitasi proses pengadaan lahan pada lokasi yang direkomendasikan.
 - c. Kemenhub akan melakukan percepatan pelaksanaan pembangunan Terminal Barang Internasional.
 - d. BNPP meminta Kementerian PUPR untuk membangun jalur steril (*dedicated line*) dari kawasan PLBN ke Terminal Barang Internasional dan sebaliknya untuk seluruh PLBN yang sedang dan akan dibangun Terminal Barang Internasional.

- e. BNPP akan mengkoordinasikan percepatan pembangunan Terminal Barang Internasional Aruk dengan K/L terkait.
- f. Berkoordinasi dengan Ditjen Bea dan Cukai, Kemenkeu dalam proses penyiapan DED dan *siteplan* Terminal Barang Internasional dalam rangka menjadikan Terminal Barang Internasional sebagai kawasan pabean.

2. Implementasi PP Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia di PLBN Entikong dan di PLBN Motaain

- a. Sosialisasi dilakukan selama bulan Maret 2018.
- b. BNPP sebagai pengelola PLBN memberi dukungan yang dibutuhkan dengan tetap menjaga ketertiban aktifitas lintas batas negara.

3. Pengaturan Mekanisme Perdagangan Umum melalui PLBN/Rencana Revisi Kepmendag Nomor 36 Tahun 1995

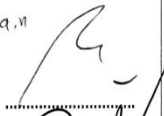
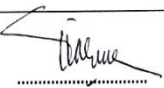
- a. Kemendag akan melakukan percepatan dalam penyelesaian Permendag tentang Mekanisme Perdagangan Ekspor dan Impor di PLBN.

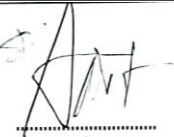
4. Hal-hal lain yang juga dibahas:

- a. Bupati Sambas bersama Kepala Bidang Pengelolaan PLBN Aruk sesuai kapasitasnya masing-masing dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, membangun komunikasi secara intensif dengan pihak Malaysia untuk mendukung pelaksanaan perlintasan kendaraan lintas batas negara melalui PLBN Aruk dan melaporkan setiap perkembangan kepada Pemerintah Pusat melalui Sekretaris BNPP.
- b. BNPP perlu melakukan evaluasi terkait dengan implementasi PP Nomor 60 Tahun 2016 dan pembelian BBM bersubsidi di wilayah Indonesia.



Formulir 01/05/2016 dan 01/05/2016

11.	Jenny S.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	
12.	Eko Winarno	Kasi Wiltasrat, Kementerian Pertahanan	
13.	Chairul Anwar	Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan	
14.	Ferdi Maulana	Kasi PLB dan Tempat Lain, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM	
15.	dr.Sholihah Widyastuti, M.Epid	Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan	
16.	Hari Rosena	Pj. Kasubbag Batas, Divhubinter Polri	
17.	Drs. Dudi Nugraha Rasika	Kasubbag Pengelolaan Perbatasan, Biro Pemerintahan Pemprov Kalbar	
18.	Haerani, S.E.	Kabid Faslak dan Monev, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, BNPP	
20.	Tiarma Pakpahan, S.E.	Kasubbid Faslak, Asisten Deputi Infrastruktur Fisik, BNPP	
21.	Anthoni Sulthan H., M.Si	Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian	
22.	Ali Murtado	Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri	

10.	Edi Samsudin Nasution	Kasubdit Batas Antar Negara dan Pulau-pulau Terluar, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri	
-----	-----------------------	---	--



PERAN TNI DAN POLRI DALAM PENGELOLAAN PLBN

POKOK-POKOK KESEPAKATAN (RENCANA TINDAK LANJUT)

RAPAT KOORDINASI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA JAKARTA, 4 APRIL 2018

Jakarta, 4 April 2018:

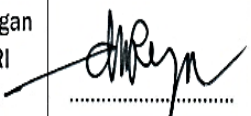
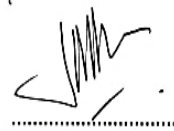
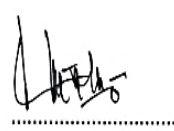
Hari ini, Rabu, tanggal Empat Bulan April Tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, dengan pokok bahasan Peran TNI dan POLRI dalam Pengelolaan PLBN, yang menyepakati hal-hal untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:

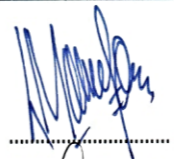
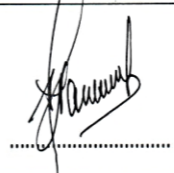
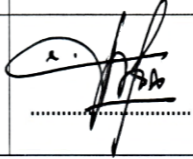
1. TNI dan Polri merumuskan SOP pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing di PLBN untuk selanjutnya dibahas lintas K/L dengan fasilitasi/koordinasi oleh Settag BNPP.
2. SOP yang akan disusun baik oleh TNI maupun oleh Polri perlu memperhatikan lokasi Pos TNI dan Pos Polri yang telah/akan dibangun oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi TNI dan Polri dapat efektif.
3. Hasil perumusan dan pembahasan tersebut pada nomor 1 dituangkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan yang bentuknya akan didiskusikan lebih lanjut.
4. Fungsi-fungsi Kepolisian perlu dipastikan untuk hadir di PLBN terlepas dari posisi fisik Pos Polisi yang dapat disediakan di PLBN/Kawasan PLBN.
5. BNPP selaku pengelola PLBN memfasilitasi kebutuhan penyelenggaraan fungsi pertahanan/TNI dan Polri.
6. BNPP perlu memfasilitasi pertemuan lanjutan sekaligus sinkronisasi Perka BNPP Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan PLBN dan membahas Permenhan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan.
7. Perlu merancang sebuah sistem pengamanan perbatasan terpadu (*integrated border security system*) sebagai dasar penyelenggaraan fungsi-fungsi pengamanan perbatasan negara baik di PLBN secara khusus maupun di kawasan perbatasan negara secara umum

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. Robert Simbolon, MPA	Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP	
2.	Yasid Sulistya, S.Sos., M.Si	Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan, Kemenkopolhukam	

1

3.	Tuti Trihastuti Sukardi	Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Kemensetneg	
4.	Dr. Gutmen Nainggolan	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian, BNPP	
5.	Rusly Baddu, S.H., M.Si	Plt. Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara, BNPP	
6.	Letkolsus Hadi Setiawan, S.Si., M.Sc	Padya 3/Udara Paban VI/Surta, SOPS TNI	

7.	Drs. Hariono	Kabag Pengkajian Lingkungan Strategi Staf Operasi, POLRI	
8.	Edi Samsudin Nasution, S.E., MAP	Kasubdit Batas Antar Negara dan Pulau-pulau Terluar, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri	
9.	S. R. Mirawati	Kabag Kerjasama, Biro Perencanaan dan Kerjasama, BNPP	
10.	Andri Indrawan, S.Sos., M.Si	Kabag Humas, Biro Keuangan, Umum, dan Humas, BNPP	
11.	Laksa TNI (Purn) TH. Soesetyo	Kelompok Ahli Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP	
12.	Andy Hakiim Arrasyid, S.T., M.Sc	PPK Pembangunan PLBN, Satker PKP Strategis, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR	

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
13.	David Sebjang, S.Sos., M.Si	Kasubbid Fasilitas Pelaksanaan, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, BNPP	
14.	Malfam Bioktava	Kasubbid Fasilitas Pelaksanaan, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, BNPP	
15.	Ismawadi	Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian, Kementan	
16.	Letkol Karnadi, S.H.	Ditjen Strategi Pertahanan, Kemenhan	
17.	dr.Sholihah Widyastuti, M.Epid	Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes	
18.	Ali Murtado	Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri	



**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
DAN TERIMA KASIH**

